

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permukiman nelayan umumnya terbangun secara spontan dan sering kali dinilai secara umum sebagai permukiman masyarakat miskin. Berbagai berita di media massa cenderung menempatkan nelayan sebagai kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang dikatakan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan). Menyebut nelayan khususnya nelayan tradisional, orang akan selalu menghubungkannya dengan kehidupan yang serba susah, hidup dengan ekonomi yang rendah, atau istilah lainnya "Hidup segan mati tak mau". Demikianlah gambaran yang diberikan oleh orang untuk menggambarkan betapa miskinnya kehidupan nelayan tradisional. Secara realitas memang kondisi kehidupan nelayan khususnya nelayan tradisional memang miskin. Gambaran ini nampaknya sangat kontradiksi dengan potensi pesisir dan laut Indonesia yang begitu besar, laut Indonesia termasuk yang paling luas di dunia. Dengan keluasan, yang sudah termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diperkirakan kurang lebih 5,8 juta kilometer dengan panjang garis pantai seluruhnya 80,790 kilometer atau 14 % panjang garis pantai di dunia. Namun anehnya nelayan tradisional tetap miskin. Bahkan bisa di katakan nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling miskin dari pada petani atau pengrajin (Mubyarto, 1984:16).

Pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama nelayan miskin yang dilakukan selama ini mencoba menerobos dan menurunkan problem kemiskinan nelayan patut diapresiasi. Namun hasil analisis menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan signifikan kesejahteraan nelayan. Berbagai kendala ditemui di lapangan, seperti kerusakan lingkungan perairan yang menjadi sumber kesejahteraan, minimnya akomodasi kearifan lokal, hak dan sistem tradisional di dalam format pemberdayaan masyarakat pesisir, serta jaminan pemasaran hasil

perikanan, termasuk belum terjadinya interkoneksi antar institusi pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan itu sendiri merupakan hal yang menuntut perhatian serius. Demikian juga institusi yang mempunyai kewenangan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan menyejahterakan masyarakat pesisir pada umumnya khususnya komunitas nelayan masih terus berkutat mencari metode, rumusan, dan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir sekaligus peningkatan bersumber sumber daya kelautan dan perikanan (Baso, 2013:76).

Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Negara Philipina disebelah utara Laut Sulawesi. Gorontalo merupakan provinsi yang ke-32 didalam wilayah Negara Indonesia yang terbentuk sejak 22 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, batas wilayah Provinsi Gorontalo tidak dinyatakan berbatasan dengan Negara Filipina tetapi Laut Sulawesi. Sementara Laut Sulawesi pada sebelah utara Gorontalo berbatasan dengan perairan Filipina Selatan. Perbatasan Negara di Laut Sulawesi menyebabkan seringkali para nelayan kedua negara melakukan penangkapan ikan pada lintas batas negara.

Sebagaimana nelayan pada umumnya, batas-batas negara di laut seringkali tidak diketahuinya karena rata-rata mereka menggunakan alat seadanya. Pilihan mencari ikan tuna karena harga jualnya bisa mencapai 30 ribu rupiah perkilo dengan berat antara 20 hingga 30 kilogram. Dalam menangkap ikan tuna di perbatasan negara di Laut Sulawesi masih dengan cara tradisional. Kapasitas perahu yang kecil sehingga maksimal hanya berdaya jangkau 2 mil dari bibir pantai. Jarak tempuh yang relatif dekat menyebabkan pendapatan ikan tuna pun tergolong minim.

Kabupaten Gorontalo Utara semuanya memiliki wilayah perairan laut dan memiliki garis panjang pantai 198,00 km<sup>2</sup> yang merupakan garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo dan berhadapan dengan Samudera Pasifik. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki perekonomian yang terdiversifikasi dalam beberapa sektor yaitu: sektor pertanian dan perkebunan, sektor peternakan, serta

sektor perikanan dan kelautan. Sektor perikanan dan kelautan dijadikan sektor unggulan, karena rata-rata mata pencaharian penduduknya adalah nelayan, dengan memiliki wilayah pesisir pantai yang cukup luas, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki daerah pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah khususnya bagi para nelayan pesisir. (Gorontalo Utara Dalam Angka, 2012)

Pembangunan Kecamatan Atinggola merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, yang bertujuan untuk mengsejahterakan masyarakat, perekonomian masyarakat Kecamatan Atinggola rata-rata masih terlihat sangat dibawah. Ini di lihat dari hasil mata pencaharian masyarakatnya, terutama pada nelayan yang berada di pesisir pantai Kecamatan Atinggola, terdapat 2 desa yang masing-masing pemukimannya berdiri di pesisir pantai yaitu Desa Imana dan desa Desa Kotajin Utara. dan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada satu desa yakni Desa Kotajin Utara. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, masyarakat Desa Kotajin Utara sebagian besar melakukan aktivitas sebagai nelayan sebagaimana masyarakat lebih banyak masih menggunakan perahu tradisional dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang di formulasikan dalam judul “Karakteristik Nelayan Tradisional di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik nelayan tradisional di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik nelayan tradisional di Desa Kotajin Utara Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **D. Manfaat**

Manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan proses implementasi teori-teori yang dibangun kuliah khususnya teori sosial ekonomi pertanian.
2. Bagi nelayan, dapat menjadi bahan informasi agar biasa melihat informasi-informasi yang baru.
3. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan kajian untuk dijadikan suatu kebijakan baru yang dapat bermanfaat bagi pengembangan masyarakat nelayan khususnya di Kecamatan Atinggola.